BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Bandung Cibeunying

Sejarah pajak mula – mula berasal dari Negara perancis pada jaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama "*Cope Napoleon*". Pada masa itu Negara belanda dijajah oleh Negara perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kapada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*"(Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Dengan surat keputusan Menteri keuanga Republik Indonesia nomor : 443/KMK.01/2001, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dipecah menjadi 2 (dua) kantor pelayanan pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan pajak Bandung Cicadas. Adapun wilayaah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi :

1. Kecamatan Cidadap
2. Kecamatan Coblong
3. Kecamatan Bandung Wetan
4. Kecamatan Sumur Bandung
5. Kecamatan Cibeunying Kaler

6. Kecamatan Cibeunying Kidul

Dan sejak bulan agustus 2007, KPP Bandung Cibeunying dimodernisasi dan berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Dengan modernisasi ini KPP Pratama Bandung Cibeunying melayani pelayanan perpajakan dengan konsep *one stop services*, dimana segala pelayanan berbagi jenis pajak mulai dari PPN, PPh, PBB dan BPTHB dilayani disini. Karakteristik dari KPP Pratama (*small Taxpayers Office*) yang telah mengalami modernisasi antara lain :

1. KPP Pratama merupakan penggabungan dari tiga unit kantor (KPP, KPPBB, dan Karipka)
2. Struktur organisasi sama dengan struktur organisasi KPP WP besar, dengan penambahan satu seksi yaitu seksi Ekstensifikasi Perpajakan
3. Sistem Administrasi perpajakan yang digunakan merupakan penggabungan SI DJP dan SISMIOP
4. Mengadministrasikan seluruh jenis pajak(PPh, PPN, PBB dan BPHTB)
5. Account Representative ditugaskan untuk mengawasi wilayah tertentu yang berada dalam wilayah kerja KPP yang bersangkutan.

Melalui modernisasi ini diharapkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak menjadi lebih efisien karena dilaksanakan disatu tempat dan juga diharapkan dengan modernisasi ini pendapatan negara dari sektor perpajakan akan mengalami peningkatan sehingga dapat menunjang pembiayaan pembangunan.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangatlah penting karena dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun susunan organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, saat mulai operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying secara resmi adalah tanggal 28 Agustus 2007 dengan menjalankan pekerjaan berdasarkan stuktur organisasi dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Bandung Cibeunying memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

5. Seksi Pelayanan;

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

7. Seksi Pemeriksaan;

8. Seksi Penagihan;

9. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:

    1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
    2. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
    3. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
    4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Deskripsi Jabatan

KPP Pratama Bandung Cibeunying terdiri atas unit kerja. Adapun tugas pokok dari setiap unti kerja yang ada KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pratama

    Orang yang mengepalai KPP Pratama dan bertanggung jawab atas kegiatan pada KPP Pratama.

2. Sub Bagian Umum

Membuat Kepala KPP Pratama dalam mengurus urusan rumah tangga KPP Pratama seperti administrasi, surat menyurat, gaji pegawai dan lainnya. Sub Bagian Umum terdiri dari:

1. Kepegawaian
2. Keuangan
3. Tata Usaha
4. Rumah Tangga

3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan antara lain:

1. Pengamatan potensi perpajakan
2. Pendataan subyek dan obyek pajak
3. Penilaian obyek pajak
4. Penguasaan monografi fiscal
5. Ekstensifikasi wajib pajak

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Merupakan jantung dari KPP Pratama karena merupakan pusat perekaman data dari SPT yang disampaikan Wajib Pajak.

5. Seksi Pelayanan

Merupakan ujung tombak KPP Pratama yang bertugas untuk melayani Wajib Pajak. Tugas Seksi Pelayanan antara lain:

1. Menerbitkan produk hukum
2. Administrasi dan penyimpanan berkas
3. Penyuluhan perpajakan

4. Penerimaan SPT dan surat permohonan Wajib Pajak
5. Penertiban NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Terdiri dari para *Account Representatives* (AR) yang ditugaskan pada wilayah tertentu. *Account Reprentatives* ini bertugas untuk mengawasi kewajiban Wajib Pajak, melayani penyelesaian hak Wajib Pajak dan sebagai tempat konsultasi Wajib Pajak. Jadi, *Account Represntatives* ini menjembatani atau sebagai mediator antara Wajib Pajak dan KPP. Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi antara lain:

1. Bimbingan/himbauan terhadap Wajib Pajak
2. Konsultasi teknis perpajakan
3. Pengawasan kepatuhan
4. Analisis kepatuhan
5. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi
6. Penyusunan profile Wajib Pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Tugas Seksi Pemeriksaan antara lain:

1. Penyusunan rencana pemeriksaan
2. Pengawasan aturan pemeriksaan
3. Penerbitan dan penyaluran SPT
4. Administrasi pemeriksaan pajak

8. Seksi Penagihan

Bertugas untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak atas tunggakan

pajaknya. Selain itu juga bertugas untuk melaksanakan penagihan aktif.

Tugas Seksi Penagihan antara lain:

1. Penatausahaan piutang pajak
2. Proses permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak
3. Penagihan Aktif
4. Usul lelang dan penghapusan piutang pajak

9. Kelompok Jabatan Fungsional

   Bertugas melakukan pemeriksaan (*Audit*) terhadap kepatuhan Waji Pajak. Pemeriksaan terdiri atas dua macam yaitu pemeriksaan lengkap dan sederhana. Adapun ketika melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak pemeriksa berhak memeriksa dokumen-dokumen akutansi Wajib Pajak termasuk dokumen yang terdapat dalam sistem komputer.

4.1.4 Aktivitas Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di wilayah Cibeunying berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying mempunyai fungsi:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

perpajakan.

2. Melakukan urusan tata usaha wajib pajak.
3. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPH, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTTL).
4. Melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan dan retitusi PPh, PPN, dan PTTL.
5. Melakukan urusan pemerikasaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

Visi KPP Pratama Bandung Cibeunying

Visi KPP Pratama Bandung Cibeunying menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercayai dan dibanggakan masyarakat.

Misi KPP Pratama Bandung Cibeunying

Misi KPP Pratama mencangkup berbagai bidang diantaranya dijelaskan di berikut ini:

1. Fiskal

   Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi

2. Ekonomi

   Mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion.*

3. Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

4.2 karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Untuk variabel X1, X2 dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu 100 Wajib Pajak Orang Pribadi . Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	f	%
Laki – laki	48	48,0
Perempuan	52	52,0
Total	100	100

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang diteliti adalah perempuan sebesar 52%, sedangkan laki- laki sebanyak 48%. Mayoritas responden adalah perempuan dengan jumlah 52 orang diakibatkan pada saat peneliti menyebarkan kuesioner kebanyakan perempuan mau mengisi sedangkan laki-laki kebanyakan menolak untuk mengisi dengan berbagai alasan sehingga jumlah responden laki-laki lebih kecil yaitu 48 orang.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	F	%
20-30 tahun	60	60,0
31-40 tahun	22	22,0
41-50 tahun	11	11,0
51-60 tahun	7	7,0
Total	100	100

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang diteliti beusia 20-30 tahun sebesar 60%, diikuti dengan usia antara 31- 40 tahun sebesar 22%, antara 41-50 tahun sebesar 11%, sedangkan sisanya antara 51-60 tahun sebesar 44%. Dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan responden usianya 20-30 tahun disebabkan semakin banyaknya pekerja diusia muda.

3. Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	F	%
Mahasiswa	1	1,0
PNS	9	9,0
Karyawan Swasta	73	73,0
Wiraswasta	17	17,0
Total	100	100

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang diteliti berprofesi sebagai karyawan swasta sebesar 73%, wiraswasta sebesar 18%, PNS sebesar 9%, dan paling sedikit mahasiswa sebesar 1%. Dapat disimpulkan bahwa paling banyak responden adalah karyawan swasta diakibatkan semakin banyak lapangan perkerjaan yang ada dikota Bandung.

4. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	F	%
SMP	1	1,0
SMA	13	13,0
Diploma	39	39,0
S1	39	39,0
S2	4	4,0
S3	4	4,0
Total	100	100

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden yang diteliti adalah Diploma dan S1, masing-masing sebesar 39%, diikuti lulusan SMA sebesar 13%, lulusan S2 dan S1 masing-masing sebesar 4%, sedangkan paling sedikit lulusan SMP sebesar 1%.

5. Profil Responden Berdasarkan Rentan Waktu Memiliki NPWP

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan rentan waktu memilki NPWP dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini

Tabel 4.5
Profil Responden Berdasarkan Rentan Waktu Memiliki NPWP

Rentang Waktu Memiliki NPWP	F	%
< 5 tahun	52	52,0
5 - 10 tahun	25	25,0
10 - 15 tahun	8	8,0
> 15 tahun	15	15,0
Total	100	100

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang diteliti memiliki NPWP kurang dari 5 tahun sebesar 52%, antara 5 hingga 10 tahun sebesar 25%, diatas 15 tahun sebesar 15%, dan paling sedikit antara 10-15 tahun sebesar 8%.

4.3 Analisis Deskriptif

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

4.3.1 Analisis Deskriptif Norma Subjektif

Norma subjektif yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Norma subjektif dapat diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 6 (enam) butir pernyataan. Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Bandung Cibeunying. Analisis kualitatif (metode

deskriptif) yang dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel norma subjektif. Berikut diuraikan tanggapan responden terhadap variabel norma subjektif

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Norma Subjektif

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Pengaruh social	1875	3000	62,5	Cukup

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

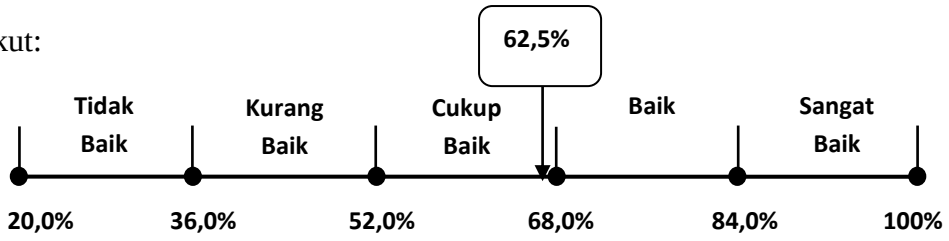
Berdasarkan tabel diatas, diketahui total skor aktual yang diperoleh sebesar 1875. Untuk mencari bagaimana tanggapan responden terhadap indikator pengaruh sosial maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1875}{6 \times 5 \times 100} \quad \text{x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1875}{3000} \quad \text{x } 100\%$$

% skor tanggapan responden = 62,5 %

Berdasarkan kepada jumlah skor yang diperoleh sebesar 1875, maka persentase tanggapan responden mengenai variabel norma subjektif adalah sebesar 62,5%. Kategori Nilai yang diperoleh tersebut dapat digambarkan dalam garis kontinum berikut:



Gambar 4.1 Gambaran Variabel Norma Subjektif
sumber:Umi Narimawati,2007:85

Nilai tanggapan responden sebesar 62,5%, bila merujuk pada perhitungan kategori menurut Umi Narimawati(2007:85) masuk kedalam kategori cukup baik (interval 52,01% - 68,00%). Berikut ini penjelasan tiap indikator variabel norma subjektif. Sebelum itu akan dijelaskan skor ideal didapat dari 5 bobot skoring dikalikan jumlah responden dan indikator, jika > 1 indikator maka kalikan saja.

Skor ideal = 5*100*1

1. Pengaruh teman sejawat/profesi

Tabel 4.7
Tanggapan responden indikator pengaruh teman

No	Pertanyaan	Bobot	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal
1	Bapak/ibu selalu melaporkan SPT karena dorongan teman sejawat/profesi	5	17	17,0	85	500
		4	22	22,0	88	
		3	39	39,0	117	
		2	8	8,0	16	
		1	14	14,0	14	
3	Bapak/ibu tidak pernah berkonsultasi dengan teman dalam memenuhi kewajiban melaporkan SPT	5	13	13,0	65	500
		4	15	15,0	60	
		3	42	42,0	126	
		2	20	20,0	40	
		1	10	10,0	10	
	Total				621	1000

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Pada pernyataan nomor 1 mayoritas responden menyatakan kadang-kadang mereka melaporkan SPT karena dorongan teman sejawat/profesi, dengan yang menyatakan sebanyak 39 responden (39%), sedangkan paling sedikit menyatakan hampir tidak pernah, dengan yang menyatakan sebanyak 8 responden (8%). Pada pernyataan nomor 3 mayoritas responden menyatakan kadang-kadang mereka berkonsultasi dengan teman dalam memenuhi kewajiban melaporkan SPT, dengan

yang menyatakan sebanyak 42 responden (42%), sedangkan paling sedikit menyatakan selalu berkonsultasi, dengan yang menyatakan sebanyak 10 responden (10%).

% skor tanggapan responden untuk pernyataan indikator pengaruh teman sejawat/profesi:

$$= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$
$$= \frac{621}{1000} \times 100\%$$
$$= 62{,}1\ \%$$

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh teman sejawat/profesi cukup baik adanya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang menjawab dengan bobot 3,4,dan 5 yaitu kadang-kadang,sering dan selalu. Artinya bahwa peran teman sejawat/profesi cukup penting dalam mempengaruhi seorang wajib pajak dalam menciptakan prilaku patuh pajak, sehubungan dengan banyaknya responden yang pekerjaannya sebagai karyawan swasta sebanyak 73 responden. Interaksi antara pribadi-pribadi dalam lingkungan kerja inilah yang berpengaruh kepada seorang wajib pajak dalam menciptakan prilaku patuh pajak.

2. Pengaruh petugas pajak

Tabel 4.8
Tanggapan responden indikator pengaruh petugas pajak

No	Pertanyaan	Bobot	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal
2	Bapak/ibu tidak pernah diingatkan untuk patuh pada peraturan pajak oleh petugas pajak	5	24	24,0	120	500
		4	15	15,0	60	
		3	28	28,0	84	
		2	17	17,0	34	
		1	16	16,0	16	
4	Bapak/ibu selalu termotivasi untuk patuh pada peraturan pajak karena citra petugas pajak	5	21	21,0	105	500
		4	11	11,0	44	
		3	33	33,0	99	
		2	21	21,0	42	
		1	14	14,0	14	
	Total				618	1000

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Pada pernyataan nomor 2 mayoritas responden menyatakan kadang-kadang mereka diingatkan untuk patuh pada peraturan pajak oleh petugas pajak, dengan yang menyatakan sebanyak 28 responden (28%), sedangkan paling sedikit menyatakan hampir tidak pernah, dengan yang menyatakan sebanyak 15 responden (15%). Pada penyataan nomor 4 mayoritas responden menyatakan kadang-kadang mereka termotivasi untuk patuh pada peraturan pajak karena citra petugas pajak, dengan yang menyatakan sebanyak 33 responden (33%), sedangkan paling sedikit menyatakan sering termotivasi, dengan yang menyatakan sebanyak 11 responden (11%). % skor tanggapan responden untuk pernyataan indikator pengaruh petugas pajak :

$$= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$
$$= \frac{618}{1000} \times 100\%$$
$$= 61{,}8\ \%$$

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh petugas pajak masuk dalam kategori cukup baik dengan 61,8%. Dari 2 pernyataan mengenai pengaruh petugas pajak responden terkuak bahwa peran petugas pajak masih terbilang cukup dalam hal melayani wajib pajak, hal ini dikuatkan dengan banyaknya tanggapan responden yang menjawab kadang-kadang untuk pernyataan peran petugas pajak dalam mengingatkan wajib pajak untuk patuh akan peraturan perpajakan serta pencitraan petugas pajak.

3. Pengaruh keluarga

Tabel 4.9
Tanggapan responden indikator pengaruh keluarga

No	Pertanyaan	Bobot	f	%	Skor Aktual	Skor Ideal
5	Bapak/ibu selalu diingatkan oleh kerabat atau keluarga untuk melaporkan SPT	5	16	16,0	80	500
		4	25	25,0	100	
		3	31	31,0	93	
		2	14	14,0	28	
		1	14	14,0	14	
6	Bapak/ibu tidak pernah ditemani kerabat atau anggota keluarga untuk melaporkan SPT	5	20	20,0	100	500
		4	18	18,0	72	
		3	33	33,0	99	
		2	21	21,0	42	
		1	8	8,0	8	
Total					636	1000

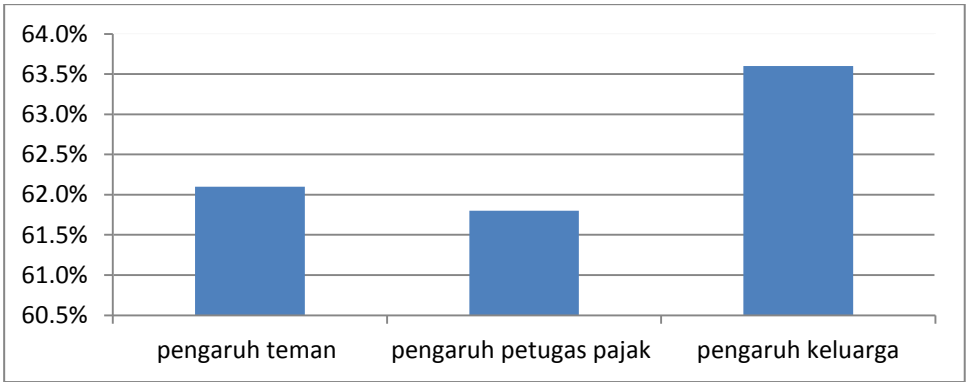
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Pada pernyataan nomor 5 mayoritas responden menyatakan kadang-kadang mereka diingatkan oleh kerabat atau keluarga untuk melaporkan SPT, dengan yang menyatakan sebanyak 31 responden (31%), sedangkan paling sedikit menyatakan hampir tidak pernah dan tidak pernah, dengan yang menyatakan masing-masing sebanyak 14 responden (14%). Pada pernyataan nomor 6 mayoritas responden menyatakan kadang-kadang mereka ditemani kerabat atau

anggota keluarga untuk melaporkan SPT, dengan yang menyatakan sebanyak 33 responden (33%), sedangkan paling sedikit menyatakan selalu ditemani, dengan yang menyatakan sebanyak 8 responden (8%). % skor tanggapan responden untuk pernyataan indikator pengaruh keluarga :

$$= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$
$$= \frac{636}{1000} \times 100\%$$
$$= 63{,}6\ \%$$

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden untuk indikator pengaruh keluarga cukup baik dengan 63,6 %. Kebanyakan responden menjawab kadang-kadang dari 2 pernyataan yang diajukan yang berarti bahwa pengaruh keluarga terbilang cukup baik. Dari semua itu akan digambarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 4.2 Histogram tanggapan responden norma subjektif

4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Admnistrasi Perpajakan

Sanksi administrasi perpajakan yang diberlakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Sanksi administrasi perpajakan dapat diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan

dioperasionalisasikan menjadi 6 (enam) butir pernyataan.Dalam tabel dibawah ini akan dijelaskan tanggapan responden sebagai berikut

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi administrasi

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Pengenaan sanksi	2333	3000	77,8	Baik

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

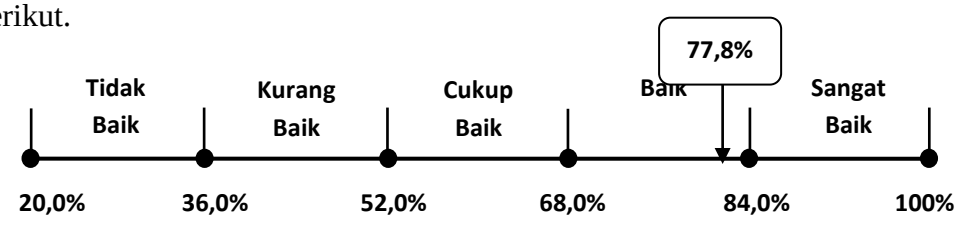
Berdasarkan tabel diatas, diketahui total skor aktual yang diperoleh sebesar 2333. Untuk mencari bagaimana tanggapan responden terhadap indikator pengenaan sangsi maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2333}{6 \times 5 \times 100} \quad \text{x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2333}{3000} \quad \text{x } 100\%$$

% skor tanggapan responden = 77,8%

Berdasarkan kepada jumlah skor yang diperoleh sebesar 2333, maka persentase tanggapan responden mengenai indikator pengenaan sanksi adalah sebesar 77,8%. Kategori Nilai yang diperoleh tersebut dapat digambarkan dalam garis kontinum berikut.



Gambar 4.3 Gambaran Variabel Sanksi Administrasi Perpajakan
Sumber:Umi Narimawati,2007:85

Nilai tanggapan responden sebesar 77,8%, bila merujuk pada perhitungan kategori masuk kedalam kategori baik (interval 68,01% - 84,00%). Berikut akan dijelaskan mengenai indikator dari variabel sanksi administrasi perpajakan, Sebelum itu akan dijelaskan skor ideal didapat dari 5 bobot skoring dikalikan jumlah responden dan indikator, jika > 1 indikator maka kalikan saja. Skor ideal = 5*100*1

1. Sanksi Denda

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Sanksi denda

No	Pertanyaan	Bobot	f	%	Skor Aktual	Skor ideal
1	Bapak/ibu selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT karena adanya sanksi denda	5	28	28,0	140	500
		4	32	32,0	128	
		3	28	28,0	84	
		2	10	10,0	20	
		1	2	2,0	2	
2	Bapak/ibu selalu melaporkan SPT lewat dari tanggal 31	5	37	37,0	185	500
		4	26	26,0	104	
		3	24	24,0	72	
		2	7	7,0	14	
		1	6	6,0	6	
	Total				755	1000

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Mayoritas responden menyatakan mereka sering tepat waktu dalam melaporkan SPT karena adanya sanksi denda, dengan yang menyatakan sebanyak 32 responden (32%), sedangkan paling sedikit menyatakan tidak pernah tepat waktu, dengan yang menyatakan sebanyak 2 responden (2%). Mayoritas responden menyatakan mereka tidak pernah melaporkan SPT lewat dari tanggal 31, dengan yang menyatakan sebanyak 37 responden (37%), sedangkan paling sedikit menyatakan selalu lewat dari tanggal 31, dengan yang menyatakan sebanyak 6 responden (6%). Dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya pemberlakuan sanksi denda untuk yang telat lapor SPT masa dan tahunan, hal ini terbukti dapat

memotivasi wajib pajak untuk tepat waktu dalam melaporkan SPT berdasarkan banyaknya tanggapan responden sering meskipun masih ada juga wajib pajak yang lalai melaporkan SPT lewat dari tanggal 31 dan terkena sanksi Rp.50,000 danRp.100,000 perSPT masa dan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1. % skor tanggapan responden untuk pernyataan indikator sanksi denda :

$$= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$= \frac{755}{1000} \times 100\%$$

$$= 75{,}5\ \%$$

2. Sanksi Bunga

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Sanksi bunga

No	Pertanyaan	Bobot	f	%	Skor Aktual	Skor ideal
3	Bapak/ibu selalu telat membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan	5	35	35,0	175	500
		4	29	29,0	116	
		3	22	22,0	66	
		2	8	8,0	16	
		1	6	6,0	6	
4	Bapak/ibu tidak pernah terkena sanksi bunga karena kurang bayar	5	31	31,0	155	500
		4	35	35,0	140	
		3	25	25,0	75	
		2	2	2,0	4	
		1	7	7,0	7	
	Total				760	1000

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Mayoritas responden menyatakan mereka tidak pernah telat membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, dengan yang menyatakan sebanyak 35 responden (35%), sedangkan paling sedikit menyatakan selalu telat, dengan yang

menyatakan sebanyak 6 responden (6%). Mayoritas responden menyatakan mereka hampir tidak pernah terkena sanksi bunga karena kurang bayar, dengan yang menyatakan sebanyak 35 responden (35%), sedangkan paling sedikit menyatakan selalu terkena sanksi, dengan yang menyatakan sebanyak 2 responden (2%). Dapat diambil kesimpulan hampir semua responden telah memenuhi kewajibannya untuk patuh dalam membayar pajak terutang tepat waktu dengan persentase 35 % untuk menjawab tidak pernah telat karena jika itdak akan dikenakan sanksi bunga 2 % dari jumlah pajak terutang serta kurang bayar responden menjawab 35 % untuk hampir tidak pernah terkena sanksi bunga sebesar 2%. % skor tanggapan responden untuk pernyataan indikator sanksi bunga

$$= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$
$$= \frac{760}{1000} \times 100\%$$
$$= 76\ \%$$

3. Sanksi Kenaikan

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Terhadap Sanksi kenaikan

No	Pertanyaan	Bobot	F	%	Skor Aktual	Skor ideal
5	Bapak/ibu selalu terkena sanksi karena ketidakbenaran SPT	5	47	47,0	235	500
		4	33	33,0	132	
		3	13	13,0	39	
		2	5	5,0	10	
		1	2	2,0	2	
6	Bapak/ibu selalu untuk tidak memenuhi kewajiban melaporkan SPT	5	44	44,0	220	500
		4	24	24,0	96	
		3	23	23,0	69	
		2	6	6,0	12	
		1	3	3,0	3	
Total					818	1000

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

Mayoritas responden menyatakan mereka tidak pernah terkena sanksi karena ketidakbenaran SPT, dengan yang menyatakan sebanyak 47 responden (47%), sedangkan paling sedikit menyatakan selalu terkena sanksi, dengan yang menyatakan sebanyak 2 responden (2%). Mayoritas responden menyatakan mereka tidak pernah untuk tidak memenuhi kewajiban melaporkan SPT, dengan yang menyatakan sebanyak 44 responden (44%), sedangkan paling sedikit menyatakan selalu untuk tidak memenuhi, dengan yang menyatakan sebanyak 3 responden (3%). Dapat disimpulkan bahwa responden mampu mengisi SPT sendiri dengan benar sehingga tidak perlu dilakukan audit pajak responden yang menjawab tidak pernah terkena sanksi kenaikan sebanyak 47%. Sanksi kenaikan juga berlaku bagi wajbi pajak yang sengaja atau tidak sengaja tidak melaporkan SPT Cuma 3 responden atau 3% yang melanggarnya selebihnya melaporkan SPT.

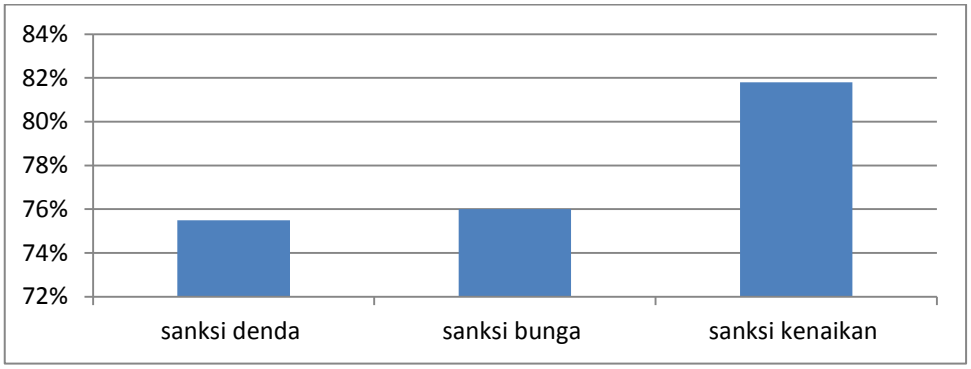
% skor tanggapan responden untuk pernyataan indikator sanksi kenaikan :

$$= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$= \frac{818}{1000} \times 100\%$$

$$= 81{,}8\ \%$$

Berdasarkan % tanggapan responden sanksi administrasi perpajakan tersebut maka akan disajikan dalam bentuk gambar berikut ini:



Gambar 4.4
Histogram tanggapan responden sanksi administrasi perpajakan

4.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 6 (enam) butir pernyataan.Dalam tabel dibawah ini akan dijelaskan tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel 4.14
Gambaran Kategori Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kepatuhan materil dan formal	1860	3000	62,0	Cukup Baik

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

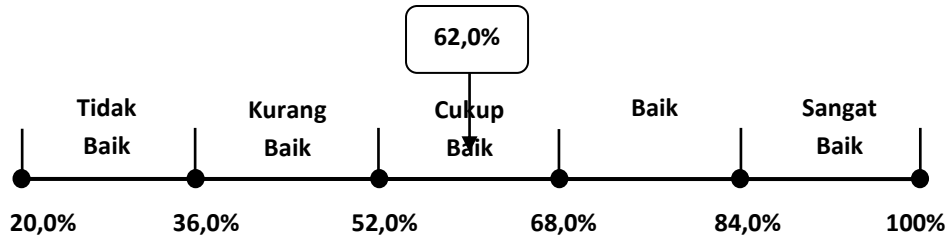
Berdasarkan tabel diatas, diketahui total skor aktual yang diperoleh sebesar 1860. Untuk mencari bagaimana tanggapan responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

% skor tanggapan responden = $\frac{1860}{6 \times 5 \times 100}$ x 100%

% skor tanggapan responden = $\frac{1860}{3000}$ x 100%

% skor tanggapan responden = 62,0%

Berdasarkan kepada jumlah skor yang diperoleh sebesar 324, maka persentase tanggapan responden mengenai adalah sebesar 62%. Kategori Nilai yang diperoleh tersebut dapat digambarkan dalam garis kontinum berikut.



Gambar 4.5 Gambaran Variabel Kepatuhan pajak orang pribadi
sumber:Umi Narimawati,2007:85

Nilai tanggapan responden sebesar 62%, bila merujuk pada perhitungan kategori masuk kedalam kategori cukup (interval 52,01% - 68,00%) menurut Umi Narimawati,(2007:85). Berikut ini akan dijelaskan tanggapan responden berdasarkan indikator dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1. Pemahaman wajib pajak pada peraturan pajak

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Terhadap pemahaman wajib pajak pada peraturan pajak

No	Pertanyaan	Bobot	f	%	Skor Aktual	Skor ideal
1	Bapak/ibu selalu up to date peraturan perpajakan terbaru	5	11	11,0	55	500
		4	33	33,0	132	
		3	34	34,0	102	
		2	10	10,0	20	
		1	12	12,0	12	
2	Bapak/ibu tidak pernah bingung mengenai peraturan perpajakan sehingga tidak pernah salah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak	5	15	15,0	75	500
		4	20	20,0	80	
		3	47	47,0	141	
		2	10	10,0	20	
		1	8	8,0	8	
	Total				645	1000

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

% skor tanggapan responden untuk pernyataan indikator pemahaman wajib pajak pada peraturan pajak :

$$= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$
$$= \frac{645}{1000} \times 100\%$$
$$= 64{,}5\ \%$$

Mayoritas responden menyatakan mereka kadang-kadang up to date peraturan perpajakan terbaru, dengan yang menyatakan sebanyak 34 responden (34%), sedangkan paling sedikit menyatakan hampir tidak pernah up to date, dengan yang menyatakan sebanyak 10 responden (10%). Mayoritas responden menyatakan mereka kadang-kadang bingung mengenai peraturan perpajakan sehingga kadang-kadang salah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, dengan yang menyatakan sebanyak 47 responden (47%), sedangkan paling sedikit menyatakan tidak pernah bingung, dengan yang menyatakan sebanyak 8 responden (8%). Dapat

disimpulkan responden merasa penting untuk mencari tahu sendiri mengenai peraturan perpajakan,hal ini dikuatkan dengan jawaban kadang-kadang sebanyak 34%, sering 33% dan selalu 11%, responden yang menjawab hampir tidak pernah dan tidak pernah hanya sebanyak 10% dan 12%. Untuk peraturan perpajakan sendiri perlu adanya pendamping dalam pemahamannya hal ini dikarenakan masih banyak responden yang menjawab kadang-kadang sebanyak 47% sehingga situasi kepatuhan akan tercipta dengan pemahaman yang baik diharapakan akan terwujud prilaku patuh

2. Mengisi SPT dengan jelas dan benar

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Terhadap mengisi SPT dengan jelas dan benar

No	Pertanyaan	Bobot	f	%	Skor Aktual	Skor ideal
3	Bapak/ibu tidak pernah kesulitan mengisi SPT dengan lengkap dan benar	5	14	14,0	70	500
		4	13	13,0	52	
		3	53	53,0	159	
		2	15	15,0	30	
		1	5	5,0	5	
4	Bapak/ibu selalu dibantu oleh orang-orang terdekat dalam mengisi SPT dengan lengkap dan benar	5	9	9,0	45	500
		4	26	26,0	104	
		3	46	46,0	138	
		2	12	12,0	24	
		1	7	7,0	7	
	Total				634	1000

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

% skor tanggapan responden untuk pernyataan indikator pemahaman wajib pajak pada peraturan pajak :

$$= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$= \frac{634}{1000} \times 100\%$$

$$= 63{,}4\ \%$$

Mayoritas responden menyatakan mereka kadang-kadang kesulitan mengisi SPT dengan lengkap dan benar, dengan yang menyatakan sebanyak 53 responden (53%), sedangkan paling sedikit menyatakan tidak pernah kesulitan, dengan yang menyatakan sebanyak 5 responden (5%). Mayoritas responden menyatakan mereka kadang-kadang dibantu oleh orang-orang terdekat dalam mengisi SPT dengan lengkap dan benar, dengan yang menyatakan sebanyak 46 responden (46%), sedangkan paling sedikit menyatakan tidak pernah dibantu, dengan yang menyatakan sebanyak 7 responden (7%). Dapat diambil kesimpulan bahwa responden dalam pengisian SPT yang jeas dan benar responden masih kesulitan untuk mengisinya dan oleh karena itu dibantu oleh orang-orang terdekat. Sehingga untuk pengisian SPT dengan jelas dan benar termasuk dalam kategori cukup baik.

3. Menghitung pajak terutang dengan benar

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Terhadap megisi SPT dengan jelas dan benar

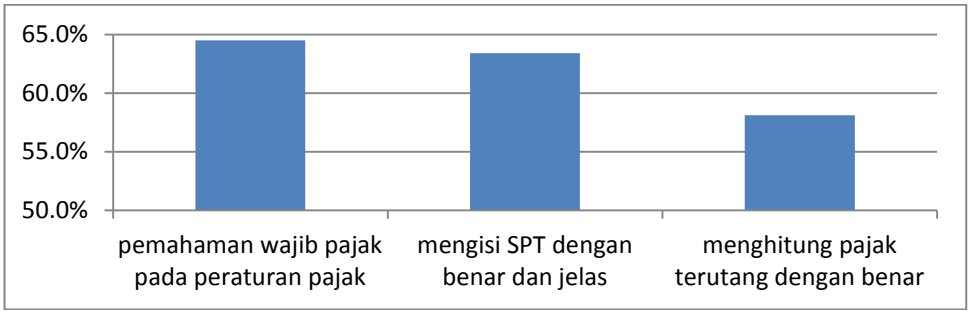
No	Pertanyaan	Bobot	f	%	Skor Aktual	Skor ideal
5	Bapak/ibu tidak pernah salah dalam menghitung pajak terutang	5	8	8,0	40	500
		4	12	12,0	48	
		3	43	43,0	129	
		2	24	24,0	48	
		1	13	13,0	13	
6	Bapak/ibu selalu konsultasi dengan petugas pajak dalam menghitung pajak terutang	5	10	10,0	50	500
		4	26	26,0	104	
		3	34	34,0	102	
		2	17	17,0	34	
		1	13	13,0	13	
Total					581	1000

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2012

% skor tanggapan responden untuk pernyataan indicator menghitung pajak terutang dengan benar :

= skor aktual x 100%
skor ideal
= 581 x 100%
1000
= 58,1 %

Mayoritas responden menyatakan mereka kadang-kadang konsultasi dengan petugas pajak dalam menghitung pajak terutang, dengan yang menyatakan sebanyak 34 responden (34%), sedangkan paling sedikit menyatakan selalu konsultasi, dengan yang menyatakan sebanyak 10 responden (10%). Mayoritas responden menyatakan mereka kadang-kadang bingung mengenai peraturan perpajakan sehingga kadang-kadang salah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, dengan yang menyatakan sebanyak 47 responden (47%), sedangkan paling sedikit menyatakan tidak pernah bingung, dengan yang menyatakan sebanyak 8 responden (8%). Dapat disimpulkan bahwa responden cukup baik dalam menghitung pajak terutang mereka sendiri dengan bantuan petugas pajak dengan menjawab sebanyak 34% kadang-kadang, sering 12% dan selalu 8% selebihnya hampir tidak pernah 12% dan tidak pernah 10%. Sedangkan untuk salah memahami peraturan perpajakan sehingga terjadi kesalahan penghitungan pajak terutang dijawab responden sebanyak 47%. Untuk kepatuhan wajib pajak dinilai cukup baik adanya. Berikut ini akan disajikan dalam bentuk gambar :



Gambar 4.6 Histogram tanggapan responden kepatuhan wajib pajak orang pribadi

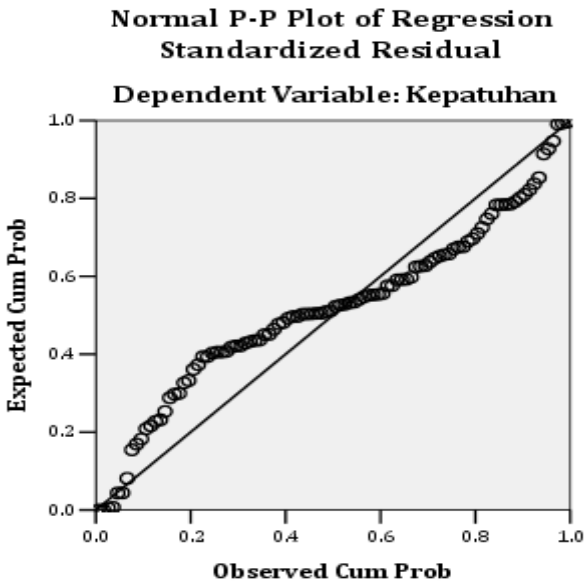
4.4 Analisis Verifikatif

Sebelum mengetahui persamaan regresi berganda dalam penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

4.4.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data digunakan pendekatan P-P plot antara *expected cumulatif probability* dengan *observed cumulatif probability*, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan gambar di atas, terlihat titik-titik koordinat antara nilai observasi dengan nilai ekspektasi mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki data yang berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Pada uji asumsi ini, akan diketahui apakah dalam model regresi saling berkorelasi linier antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang

lainnya atau tidak. Dengan kriteria pengujian tidak terdapat multikolinieritas jika VIF ≤ 10,00. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.18
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Norma subjektif	,639	1,565
	Sangsi administrasi	,639	1,565

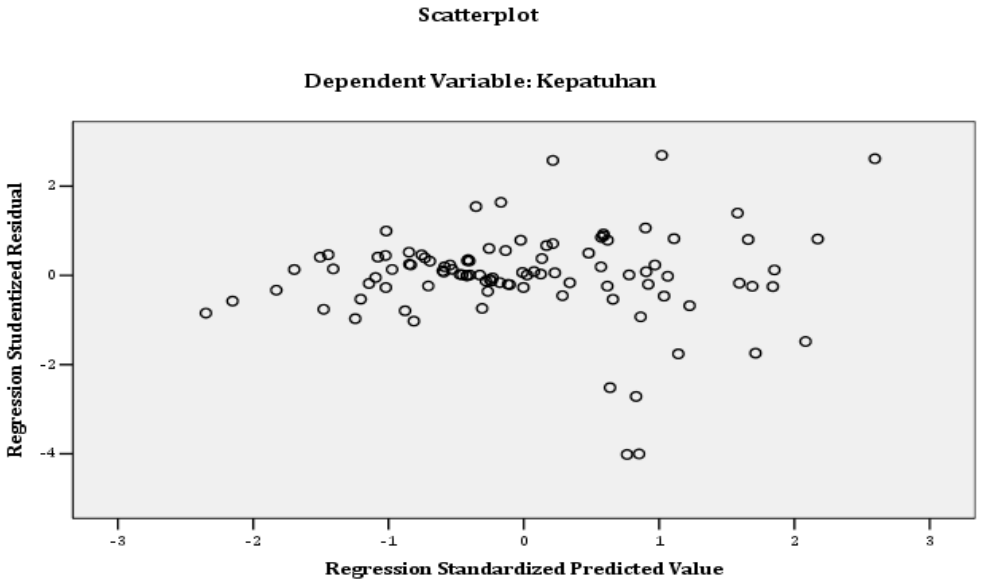
a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan hasil perhitungan statistic yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS didapatkan hasil bahwa nilai tolerance untuk variabel norma subjektif dan sanksi administrasi > 0,1 dan nilai VIF kedua variabel bebas < 10,00 sehingga kedua variabel bebas dinyatakan tidak memiliki masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari residual tidak sama untuk semua pengamatan, yang menyebabkan estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi. Jika dari suatu pengamatan tersebut terdapat varian yang berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Dengan kata lain pengujian ini dimaksudkan untuk melihat jarak kuadrat titik-titik sebaran terhadap garis regresi. Dalam model regresi diharapkan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Menguji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat pola titik-titik pada *scatter plot* regresi. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka terjadi heterokedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan scatter plot pada regresi, dapat diketahui bahwa pola titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dari ketiga pengujian asumsi klasik di atas, terlihat bahwa semua asumsi terpenuhi, sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

1.4.2 Persamaan Regersi Linear Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$

Y = nilai taksiran untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi

a = konstanta

b = koefisien regresi

X_1 = Norma subjektif

X_2 = Sanksi administrasi perpajakan

Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.19
Koefisien Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,015	2,137		2,346	,021
	Norma subjektif	,412	,167	,266	2,471	,015
	Sangsi administrasi	,273	,089	,330	3,070	,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai a sebesar 5,015 nilai b_1 sebesar 0,412 dan b_2 sebesar 0,273. Dengan demikian maka dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 5,015 + 0,412\ X_1 + 0,273X_2$$

Nilai a b_1 dan b_2 dalam persamaan di atas dapat diinteretasikan sebagai berikut:

A =5,015 artinya: jika norma subjektif dan sanksi administrasi perpajakan bernilai 0 satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan bernilai 5,015 satuan.

b_1 =0,412 artinya: jika norma subjektif meningkat sebesar satu satuan sementara sanksi administrasi perpajakan konstan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,412 satuan.

b_2 =0,273 artinya: jika sangsi administrasi perpajakan meningkat sebesar satu satuan sementara norma subjektif konstan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,273 satuan.

1.4.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier di antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut akan diuraikan analisis korelasi baik korelasi parsial maupun korelasi berganda.

1.4.3.1 Pengaruh Norma subjektif (X_1) terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

1. Koefisien korelasi

   Dengan menggunakan software SPSS untuk , diperoleh hasil analisis korelasi parsial antara norma subjektif (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.20
Koefisien Korelasi Parsial X_1 dengan Y

Correlations

		Kepatuhan
Norma subjektif	Pearson Correlation	,464
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100

Berdasarkan output di atas, diketahui koefisien korelasi parsial antara norma subjektif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,464. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan parsial yang terjadi antara norma subjektif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah searah, dimana semakin tinggi norma subjektif, maka akan diikuti oleh semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai 0,464 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara norma subjektif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berada dalam kategori hubungan sedang (interval 0,40 – 0,599).

2. Koefisien determinasi

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan dengan cara nilai beta X zero order pada output SPSS sebagai berikut :

Tabel 4.21
Koefisien Determinasi Secara Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Norma subjektif	,266	,464
	Sangsi administrasi	,330	,489

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus *beta* X *zero order* :

Variabel norma subjektif=(0,266) x (0,464) = 0,1232 atau 12,32%

Dari hasil perhitungan secara parsial di atas, dapat diketahui pengaruh norma subjektif (X_1) sebesar 12,32%

3. Hipotesis

Ho : $\beta_1 = 0$ Norma subjektif secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Ha : $\beta 1 = 0$ Norma subjektif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak Ho jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X1 sebagai berikut

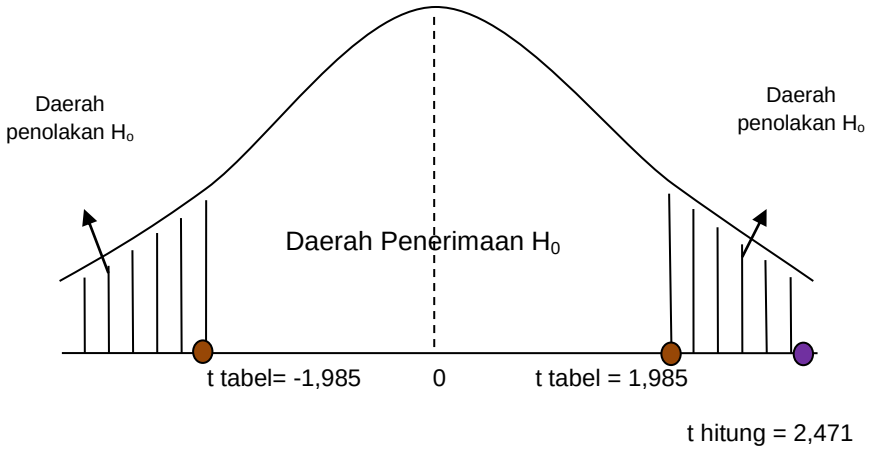
Tabel 4.22
Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) X_1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,015	2,137		2,346	,021
	Norma subjektif	,412	,167	,266	2,471	,015
	Sangsi administrasi	,273	,089	,330	3,070	,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai t hitung untuk norma subjektif sebesar 2,471. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=100-2-1=97, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar ± 1,985. Diketahui bahwa t hitung untuk X_1 sebesar 2,471 > t tabel 1,985, maka Ho diterima artinya norma subjektif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika digambarkan, nilai t hitung dan t tabel untuk pengujian parsial X_1 tampak sebagai berikut:



Gambar 4.9 Kurva Uji Hipotesis Parsial X_1 terhadap Y

4. Analisis

Berdasarkan uji hipotesis X_1 diketahui bahwa norma subjektif berpengaruh siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimensi pedoman prilaku wajib pajak orang pribadi berhasil mempengaruhi prilaku wajib pajak itu sendiri untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya oleh karena itu searah dengan penelitian Natrah Saad(2010) . pedoman perilaku yang di persepsikan oleh petugas pajak, teman sejawat dan keluarga mampu mempengaruhi prilaku wajib pajak untuk patuh, meskipun peran dari petugas pajak belum mampu untuk berpengaruh. Dapat diambil kesimpulan sesuai dengan fenomena yang ada bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kinerja petugas pajak yang sedang disorot karena kasus korupsi serta kurangya sosialisasi dalam memberikan pengetahuan kepada wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.4.3.2 Pengaruh Sanksi administrasi perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

1. Koefisien korelasi

Dengan menggunakan software SPSS, diperoleh hasil analisis korelasi parsial antara sanksi administrasi perpajakan (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.23
Koefisien Korelasi Parsial X_2 dengan Y

Correlations

		Kepatuhan
Sangsi administrasi	Pearson Correlation	,489
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100

Berdasarkan output di atas, diketahui koefisien korelasi parsial antara sangsi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,489. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan parsial yang terjadi antara sangsi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah searah, dimana semakin besar sangsi administrasi perpajakan akan diikuti oleh semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai 0,489 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara sangsi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berada dalam kategori hubungan sedang (interval 0,40 – 0,599).

2. Koefisien determinasi

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan dengan cara nilai beta X zero order pada output SPSS sebagai berikut :

Tabel 4.24
Koefisien Determinasi Secara Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Norma subjektif	,266	,464
	Sangsi administrasi	,330	,489

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus *beta* X *zero order* :

Variabel sanksi administrasi perpajakan =(0,330) x (0,489) = 0,1614 atau 16,14%

Dari hasil perhitungan secara parsial di atas, dapat diketahui bahwa variabel yang paling berengaruh terhadap variabel terikat adalah variabel sanksi administrasi perpajakan (X_2) sebesar 16,14% dan diikuti dengan variabel norma subjektif (X_1) sebesar 12,32% maka total pengaruh secara keseluruhan sebesar 28,46% dan sisanya 71,54% merupakan variabel lain yang tidak diteliti.

3.Hipotesis

Ho : $\beta_2 = 0$ sanksi administrasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Ha : $\beta_2 = 0$ sanksi administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak Ho jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_2 sebagai berikut:

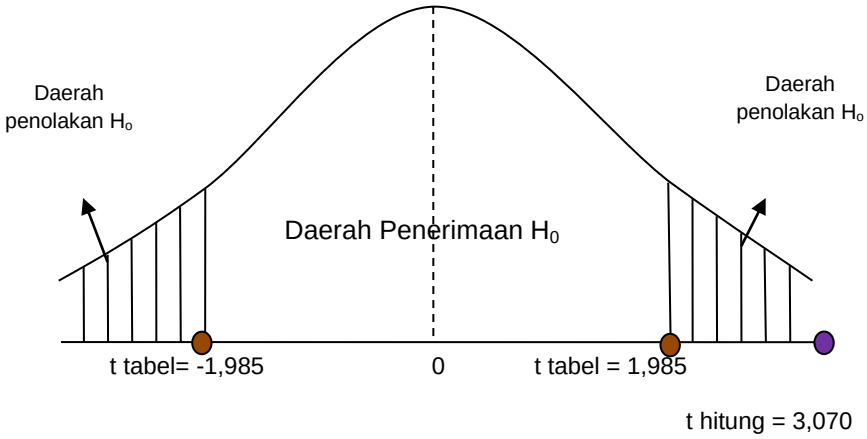
Tabel 4.25 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) X_2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,015	2,137		2,346	,021
	Norma subjektif	,412	,167	,266	2,471	,015
	Sangsi administrasi	,273	,089	,330	3,070	,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai t hitung untuk sangsi administrasi perpajakan sebesar 3,070. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=100-2-1=97, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar ± 1,985. Diketahui bahwa t hitung untuk X_2 sebesar 3,070> t tabel 1,985, maka H_o ditolak artinya sangsi administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika digambarkan, nilai t hitung dan t tabel untuk pengujian parsial X_2 tampak sebagai berikut:



Gambar 4.10 Kurva Uji Hipotesis Parsial X_2 terhadap Y

4.Analisis

Berdasarkan uji hipotesis X_2 diketahui bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi administrasi mendukung dalam memotivasi wajib pajak untuk patuh dikarenakan sanksi bertujuan untuk mencegah terjadinya prilaku tidak patuh. Hal ini senada dengan penelitian Nicoleta barbuta-misu(2011) yang menyebutkan bahwa dengan adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak . Berdasarkan fenomena yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa masih ada wajib pajak yang terkena sanksi administrasi dikarenakan lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Oleh kerna diharapkan dengan adanya pengenaan sanksi administrasi dapat mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, terlebih apabila pengawasan dari petugas pajak lebih ketat dan didukung oleh kesadaran wajib pajak orang pribadi.

1.4.3.3 Pengaruh Norma subjektif (X_1) dan Sanksi administrasi perpajakan (X_2) dengan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

1. Koefisien korelasi

Dengan menggunakan software SPSS, diperoleh hasil analisis korelasi simultan antara Norma subjektif (X_1) dan sangsi administrasi perpajakan (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.26
Koefisien Korelasi Simultan Antara X_1,X_2 dengan Y

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,533[a]	,2846	,270	2,50797

a. Predictors: (Constant), Sangsi administrasi, Norma subjektif

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan output di atas, diketahui koefisien korelasi simultan antara norma subjektif dan sangsi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,533. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan simultan yang terjadi antara norma subjektif dan sangsi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah searah, dimana semakin tinggi norma subjektif dan sangsi administrasi perpajakan secara simultan akan diikuti oleh semakin besarnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai 0,533 menunjukkan hubungan simultan yang terjadi antara norma subjektif dan sangsi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berada dalam kategori hubungan sedang (interval 0,40-0,599).

2. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai R-Square. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Norma subjektif dan sangsi administrasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel output berikut:

Tabel 4.27
Koefisien Determinasi Secara Simultan

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,533[a]	,2846	,270	2,50797

a. Predictors: (Constant), Sangsi administrasi, Norma subjektif

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Dari tabel hasil *output* SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,2846 atau 28,46%. Hal ini menunjukkan bahwa norma subjektif dan sanksi administrasi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 28,46%. sedangkan sisanya sebesar 100% - 28,46% = 71,54% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti

3. .Hipotesis

Untuk menguji apakah variabel norma subjektif dan sangsi administrasi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dilakukan pengujian hipotesis simultan sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = 0$, Artinya, tidak terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari norma subjektif (X_1) dan sangsi administrasi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (variabel Y).

H_a : paling sedikit ada satu $\beta_i \neq 0$, Artinya, terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari norma subjektif (X_1) dan sangsi administrasi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Taraf signifikansi (α) : 0,05

Kriteria uji : tolak H_0 jika nilai F-hitung > F-tabel, terima H_a jika nilai F-hitung > F-tabel

Nilai statistik uji F dapat diketahui dari tabel output berikut:

Tabel 4.28
Uji Statistik F

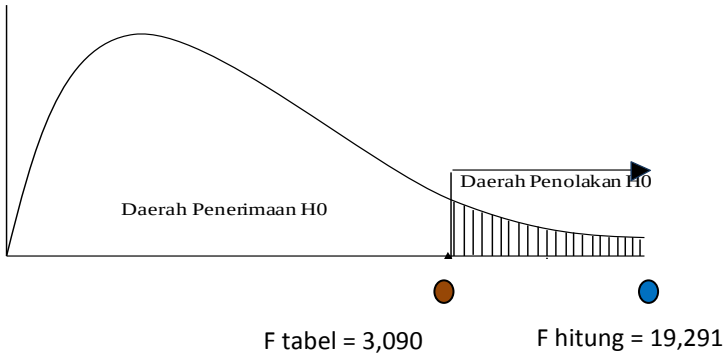
ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	242,680	2	121,340	19,291	,000[a]
	Residual	610,120	97	6,290		
	Total	852,799	99			

a. Predictors: (Constant), Sangsi administrasi, Norma subjektif

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan tabel output di atas, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 19,291. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Dengan α=0,05, db1=2 dan db2=97, diketahui nilai F tabel sebesar 3,090. Dari nilai-nilai di atas, diketahui nilai F hitung (19,291) > F tabel (3,090), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari norma subjektif (X_1) dan sangsi administrasi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Jika disajikan dalam gambar, maka nilai F hitung dan F tabel tampak sebagai berikut:



Gambar 4.11 Kurva Uji Hipotesis Simultan X_1 dan X_2 terhadap Y

4. Analisis

Berdasarkan hasil uji simultan diketahui bahwa pengaruh norma subjektif dan sanksi admnistrasi perpajakan cukup untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini ditunjukan dengan koofesien korelasi 0.533(interval 0,40-0,599). Sedangkan berdasarkan koefisien determinasi pengaruh kedua variabel bebas ini hanya 28,46%. sedangkan sisanya sebesar 100% - 28,46% = 71,54% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Pengaruh dari faktor lain ini sangat besar, berdasarkan pantauan peneliti saat menyebarkan kuesioner pengaruh dari faktor lain ini berasal dari tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak itu sendiri serta kualitas pelayanan petugas pajak yang dikritik oleh responden pada saat mengisi kuesioner. Pada variabel norma subjektif pengaruh teman sangat besar dalam mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam mematuhi pajak, hal ini didasarkan pada peranan lingkungan sosial. Sedangkan dalam variabel sanksi administrasi pengenaan sanksi yang sering didapat oleh wajib pajak adalah sanksi denda yang biasanya dikenakan jika terlambat setor dan bayar pajak